



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara diberikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kinerja, motivasi dan disiplin kerja yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dengan menerapkan prinsip keadilan, objektif, transparan, dan konsisten serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022, namun sehubungan dengan pelaksanaan perhitungan pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kinerja, maka Peraturan Bupati tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9);
 18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran pemberian TPP diberikan berdasarkan pada komposisi pengukuran:
 - a. Aspek Kinerja; dan
 - b. Aspek Kedisiplinan.
- (2) Pengukuran aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. aspek kinerja diukur berdasarkan laporan pelaksanaan tugas harian yang dibuat oleh masing-masing pegawai sebagai sasaran kinerja pegawai yang telah diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung/pejabat yang berwenang;
 - b. kinerja harian sebagaimana dimaksud pada huruf a diukur berdasarkan hitungan setiap 1 (satu) jam dan kelipatannya selama dalam pelaksanaan tugas dan diberikan nilai setiap 1 (satu) jamnya sebesar 1 (satu); dan
 - c. jumlah nilai aspek kinerja dalam 1 (satu) bulan diukur berdasarkan penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kalender dengan nilai batas maksimal sebesar 100 (seratus) atau berdasarkan persentase capaian kinerja.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja dan target kinerja setiap bulan.
- (4) Bobot penilaian aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari besaran TPP yang bersifat Dinamis.
- (5) Bobot penilaian aspek kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran TPP yang bersifat Dinamis.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian capaian kinerja akhir bulan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menjadi dasar penghitungan besaran TPP aspek kinerja pada bulan berikutnya.
 - (2) Selain aspek kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdapat juga aspek kinerja berdasarkan jam kerja sebagai berikut:
 - a. Kinerja Pegawai dengan predikat sangat kurang dengan melaksanakan jam kerja kurang dari 50 (lima puluh) jam dalam satu bulan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari bobot penilaian aspek kinerja;
 - b. Kinerja Pegawai dengan predikat kurang dengan melaksanakan jam kerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh) jam diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari bobot penilaian aspek kinerja;
 - c. Kinerja Pegawai dengan predikat butuh perbaikan apabila melaksanakan jam kerja antara 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) jam diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari bobot penilaian aspek kinerja;
 - d. Kinerja Pegawai dengan predikat baik dan sangat baik apabila melaksanakan jam kerja 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) jam diberikan TPP sebesar 100% (seratus perseratus) dari bobot penilaian aspek kinerja;
 - (3) Dalam hal tidak melaporkan sama sekali kinerja melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai (SIKAP), maka TPP Kinerja tidak diberikan pada bulan berkenaan.
3. Ketentuan pada Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengukuran terhadap aspek kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan unsur sebagai berikut:
 - a. kedisiplinan jam kerja; dan
 - b. bebas dari hukuman disiplin.
- (2) Pengukuran terhadap aspek kedisiplinan berfungsi sebagai pengurang besaran TPP hasil penghitungan aspek kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- (3) Pengurangan besaran TPP berdasarkan aspek kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak hadir tanpa alasan yang sah, diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus) per hari dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus) untuk setiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - b. hadir terlambat:
 - 1) 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - 2) 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu perseratus);
 - 3) 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, diberikan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
 - 4) lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau AKBP masuk kerja, diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).
 - c. pulang lebih cepat:
 - 1) 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - 2) 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu perseratus);
 - 3) 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, diberikan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
 - 4) lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau AKBP pulang kerja, diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).
 - d. tidak hadir tanpa alasan yang sah sesuai dengan daftar undangan dalam rapat paripurna, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus);
 - e. tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam pengajian rutin tingkat Daerah sesuai dengan daftar undangan, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus);
 - f. tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam rapat koordinasi tingkat Daerah sesuai dengan daftar undangan, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus);
 - g. absensi di luar kantor tanpa alasan yang sah dianggap tidak melakukan absensi; dan
 - h. sedang menjalani hukuman disiplin.

- (4) Selain pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPP ditunda pembayarannya dalam hal sebagai berikut:
 - a. pegawai wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pegawai wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tidak menyampaikan LHKASN sesuai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban penyetoran TPTGR sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau keputusan pejabat yang berwenang; dan
 - d. Memanfaatkan/menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara tidak sah.
- (5) Pegawai wajib LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b berakhir setelah disampaikannya LHKPN atau LHKASN;
- (7) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berakhir setelah dibayarkannya kewajiban penyetoran TPTGR sesuai SKTJM atau keputusan pejabat yang berwenang;
- (8) Dalam hal tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan, diberikan pengurangan sebesar 5% (lima perseratus) per hari dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus);
- (9) Dalam hal hadir terlambat dan pulang cepat secara kumulatif lebih dari 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) menit dalam 1 (satu) bulan, diberikan pengurangan dengan perhitungan:
 - a. hadir terlambat:
 - 1) 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu perseratus);
 - 2) 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus);
 - 3) 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, diberikan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus); dan
 - 4) lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau AKBP masuk kerja, diberikan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).

- b. Pulang lebih cepat:
- 1) 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu perseratus);
 - 2) 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus);
 - 3) 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, diberikan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus); dan
 - 4) lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau AKBP pulang kerja, diberikan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).
4. Ketentuan dalam Lampiran I huruf A Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran IV huruf B Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 91

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 91 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 Desember 2022

BESARAN TPP

A. STRUKTURAL

| No | Nama Jabatan Struktural | Besaran TPP (Rp) |
|----|--|------------------|
| I | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 1 | Sekretaris Daerah | 28.100.511 |
| 2 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 20.500.228 |
| 3 | Kepala Bagian Pemerintahan | 10.900.119 |
| 4 | Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan | 5.100.326 |
| 5 | Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan | 5.100.326 |
| 6 | Kelompok Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah | 5.100.326 |
| 7 | Kepala Bagian Hukum | 10.900.119 |
| 8 | Kelompok Substansi Perundang-Undangan | 5.100.326 |
| 9 | Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi | 5.100.326 |
| 10 | Kelompok Substansi Bantuan Hukum | 5.100.326 |
| 11 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | 10.900.119 |
| 12 | Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat | 5.100.326 |
| 13 | Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual | 5.100.326 |
| 14 | Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial | 5.100.326 |
| 15 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | 20.500.228 |
| 16 | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 10.900.119 |
| 17 | Kelompok Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD | 5.100.326 |
| 18 | Kelompok Substansi Sumber Daya Alam | 5.100.326 |
| 19 | Kelompok Substansi Perekonomian | 5.100.326 |
| 20 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | 10.900.119 |
| 21 | Kelompok Substansi Pengendalian Program | 5.100.326 |
| 22 | Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan | 5.100.326 |
| 23 | Kelompok Substansi Penyusunan Program | 5.100.326 |
| 24 | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 10.900.119 |
| 25 | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 5.100.326 |
| 26 | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 5.100.326 |
| 27 | Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 5.100.326 |
| 28 | Asisten Administrasi Umum | 20.500.228 |
| 29 | Kepala Bagian Umum | 10.900.119 |
| 30 | Kelompok Substansi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 5.100.326 |
| 31 | Kelompok Substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan | 5.100.326 |
| 32 | Kelompok Substansi Keuangan | 5.100.326 |
| 33 | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 10.900.119 |
| 34 | Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan | 5.100.326 |
| 35 | Kepala Sub Bagian Protokol | 5.100.326 |

| | | |
|-----|---|------------|
| 36 | Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan | 5.100.326 |
| 37 | Kepala Bagian Organisasi | 10.900.119 |
| 38 | Kelompok Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 5.100.326 |
| 39 | Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 5.100.326 |
| 40 | Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 5.100.326 |
| II | SEKRETARIAT DPRD | |
| 41 | Sekretaris DPRD | 17.000.864 |
| 42 | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | 9.800.558 |
| 43 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | 4.700.628 |
| 44 | Kelompok Substansi Program dan Keuangan; | 4.700.628 |
| 45 | Kelompok Substansi Rumah Tangga. | 4.700.628 |
| 46 | Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan | 9.800.558 |
| 47 | Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan; | 4.700.628 |
| 48 | Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah; | 4.700.628 |
| 49 | Kelompok Substansi Humas, Protokol dan Publikasi. | 4.700.628 |
| 50 | Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | 9.800.558 |
| 51 | Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran; | 4.700.628 |
| 52 | Kelompok Substansi Fasilitasi Pengawasan; | 4.700.628 |
| 53 | Kelompok Substansi Kerjasama dan Aspirasi. | 4.700.628 |
| III | INSPEKTORAT | |
| 54 | Inspektur | 20.400.594 |
| 55 | Sekretaris Inspektorat | 10.600.604 |
| 56 | Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum | 4.900.477 |
| 57 | Kelompok Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan | 4.900.477 |
| 58 | Inspektur Pembantu Wilayah I | 9.901.905 |
| 59 | Inspektur Pembantu Wilayah II | 9.901.905 |
| 60 | Inspektur Pembantu Wilayah III | 9.901.905 |
| 61 | Inspektur Pembantu Khusus | 9.901.905 |
| IV | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | |
| 62 | Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 15.600.454 |
| 63 | Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 8.500.822 |
| 64 | Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian | 3.000.055 |
| 65 | Kelompok Substansi Program | 3.000.055 |
| 66 | Kelompok Substansi Keuangan | 3.000.055 |
| 67 | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | 5.500.376 |
| 68 | Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 3.000.055 |
| 69 | Seksi Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 3.000.055 |
| 70 | Kepala Bidang Pembinaan SD | 5.500.376 |
| 71 | Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD | 3.000.055 |
| 72 | Kepala Seksi Ketenagaan SD | 3.000.055 |
| 73 | Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana | 3.000.055 |

| | | |
|-----|---|------------|
| 74 | Kepala Bidang Pembinaan Pemuda Dan Olahraga | 5.500.376 |
| 75 | Kelompok Substansi Pemuda; | 3.000.055 |
| 76 | Kelompok Substansi Olahraga; | 3.000.055 |
| 77 | Kelompok Substansi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga. | 3.000.055 |
| 78 | Kepala Bidang Pembinaan SMP | 5.500.376 |
| 79 | Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP | 3.000.055 |
| 80 | Seksi Ketenagaan SMP | 3.000.055 |
| V | DINAS KESEHATAN | |
| 81 | Kepala Dinas Kesehatan | 15.600.454 |
| 82 | Sekretaris Dinas Kesehatan | 8.500.822 |
| 83 | Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian | 3.000.055 |
| 84 | Kepala Sub Bagian Program | 3.000.055 |
| 85 | Kelompok Substansi Keuangan. | 3.000.055 |
| 86 | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan | 5.500.376 |
| 87 | Kelompok Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; | 3.000.055 |
| 88 | Kelompok Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; | 3.000.055 |
| 89 | Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan. | 3.000.055 |
| 90 | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan | 5.500.376 |
| 91 | Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; | 3.000.055 |
| 92 | Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan; | 3.000.055 |
| 93 | Kelompok Substansi Mutu Pelayanan Kesehatan. | 3.000.055 |
| 94 | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | 5.500.376 |
| 95 | Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi; | 3.000.055 |
| 96 | Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; | 3.000.055 |
| 97 | Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. | 3.000.055 |
| 98 | Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit | 5.500.376 |
| 99 | Kelompok Substansi Surveilans dan Imunisasi; | 3.000.055 |
| 100 | Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; | 3.000.055 |
| 101 | Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. | 3.000.055 |
| | Puskesmas Cigugur | |
| 102 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | Puskesmas Parigi | |
| 103 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | Puskesmas Langkaplancar | |
| 104 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | Puskesmas Mangunjaya | |
| 105 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | Puskesmas Cijulang | |
| 106 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | Puskesmas Jadikarya | |
| 107 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |

| | | |
|-----|---|------------|
| | Puskesmas Cimerak | |
| 108 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | Puskesmas Kalipucang | |
| 109 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | Puskesmas Padaherang | |
| 110 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | Puskesmas Sindangwangi | |
| 111 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | Puskesmas Pangandaran | |
| 112 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | Puskesmas Cikembulan | |
| 113 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | Puskesmas Sidamulih | |
| 114 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | Puskesmas Legokjawa | |
| 115 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | Puskesmas Selasari | |
| 116 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | UPTD FARMASI | |
| 117 | Kepala UPTD Farmasi | 2.900.130 |
| 118 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | UPTD LABKESDA | |
| 119 | Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah | 2.900.130 |
| 120 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | UPTD RSUD | |
| 121 | Direktur | 8.500.822 |
| 122 | Kepala Bagian Tata Usaha | 5.500.376 |
| 123 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 3.000.055 |
| 124 | Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan | 3.000.055 |
| 125 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset | 3.000.055 |
| 126 | Kepala Bidang Pelayanan Medis | 5.500.376 |
| 127 | Kepala Seksi Pelayanan Medis | 3.000.055 |
| 128 | Kepala Seksi Mutu Pelayanan Medis | 3.000.055 |
| 129 | Kepala Bidang Keperawatan | 5.500.376 |
| 130 | Kepala Seksi Asuhan Keperawatan | 3.000.055 |
| 131 | Kepala Seksi Mutu Keperawatan | 3.000.055 |
| 132 | Kepala Bidang Pelayanan Penunjang | 5.500.376 |
| 133 | Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis | 3.000.055 |
| 134 | Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis | 3.000.055 |
| VI | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 135 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 15.100.071 |
| 136 | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 8.300.615 |
| 137 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2.900.130 |
| 138 | Kelompok Substansi Program dan Keuangan | 2.900.130 |
| 139 | Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Iklim, Promosi, Pengendalian dan Sistem Informasi | 5.500.376 |
| 140 | Kelompok Substansi Pengembangan Iklim dan Promosi; | 2.900.130 |

| | | |
|-----|---|------------|
| 141 | Kelompok Substansi Pengendalian dan Sistem Informasi. | 2.900.130 |
| 142 | Koordinator Kelompok Substansi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan | 5.500.376 |
| 143 | Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I | 2.900.130 |
| 144 | Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II | 2.900.130 |
| 145 | Koordinator Kelompok Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan | 5.500.376 |
| 146 | Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Informasi; | 2.900.130 |
| 147 | Kelompok Substansi Kebijakan dan Pelaporan Layanan. | 2.900.130 |
| VII | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 148 | Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 15.600.454 |
| 149 | Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 8.500.822 |
| 150 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 3.000.055 |
| 151 | Kelompok Substansi Program | 3.000.055 |
| 152 | Kelompok Substansi Keuangan | 3.000.055 |
| 153 | Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata | 5.500.376 |
| 154 | Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Infrastruktur Pariwisata | 3.000.055 |
| 155 | Kelompok Substansi Tata Kelola Destinasi. | 3.000.055 |
| 156 | Kepala Bidang Pemasaran, Produk Wisata dan Penyelenggaraan Event Pariwisata | 5.500.376 |
| 157 | Kelompok Substansi Pengelola Produk Wisata dan Penyelenggaraan Event; | 3.000.055 |
| 158 | Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Pemasaran Pariwisata. | 3.000.055 |
| 159 | Kepala Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif | 5.500.376 |
| 160 | Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Digital dan Prodak Kreatif; | 3.000.055 |
| 161 | Kelompok Substansi Pengembangan Industri dan Investasi Pariwisata. | 3.000.055 |
| 162 | Kepala Bidang Kebudayaan | 5.500.376 |
| 163 | Kelompok Substansi Kreasi dan Produksi Karya Seni; | 3.000.055 |
| 164 | Kelompok Substansi Pengelola Penelitian, Kepurbakalaan dan Pengembangan Kebudayaan. | 3.000.055 |
| | UPTD PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WILAYAH CIJULANG | |
| 165 | Kepala UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang | 2.900.130 |
| 166 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | UPTD PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PANGANDARAN | |
| 167 | Kepala UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Pangandaran | 2.900.130 |
| 168 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |

| | | |
|------|---|------------|
| VIII | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| 169 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 15.100.071 |
| 170 | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 8.300.615 |
| 171 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 2.900.130 |
| 172 | Kasubag Program dan Keuangan | 2.900.130 |
| 173 | Kepala Bidang Bina Marga | 5.500.376 |
| 174 | Kelompok Substansi Jalan dan Jembatan; | 2.900.130 |
| 175 | Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. | 2.900.130 |
| 176 | Kepala Bidang Cipta Karya | 5.500.376 |
| 177 | Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Pemukiman | 2.900.130 |
| 178 | Kelompok Substansi Penataan, Pengelolaan Bangunan dan Gedung serta Jasa Konstruksi | 2.900.130 |
| 179 | Kelompok Substansi Pengelolaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi | 2.900.130 |
| 180 | Kepala Bidang Tata Ruang | 5.500.376 |
| 181 | Kelompok Substansi Penataan dan Pemanfaatan Ruang | 2.900.130 |
| 182 | Kelompok Substansi Pengendalian Ruang | 2.900.130 |
| 183 | Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air | 5.500.376 |
| 184 | Kelompok Substansi Irigasi | 2.900.130 |
| 185 | Kelompok Substansi Sungai, Danau dan Rawa. | 2.900.130 |
| | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | |
| 186 | Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 2.700.282 |
| IX | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 187 | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 15.600.454 |
| 188 | Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 8.500.822 |
| 189 | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | 3.000.055 |
| 190 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 3.000.055 |
| 191 | Kepala Bidang Sosial | 5.500.376 |
| 192 | Kelompok Substansi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial | 3.000.055 |
| 193 | Kelompok Substansi Penanganan dan Rehabilitasi Sosial | 3.000.055 |
| 194 | Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 5.500.376 |
| 195 | Kelompok Substansi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | 3.000.055 |
| 196 | Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 3.000.055 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 197 | Kepala Bidang Penataan Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa | 5.500.376 |
| 198 | Kelompok Substansi Penataan Desa | 3.000.055 |
| 199 | Kelompok Substansi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa | 3.000.055 |
| X | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 200 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 15.100.071 |
| 201 | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8.300.615 |
| 202 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan | 2.900.130 |
| 203 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum | 2.900.130 |
| 204 | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 5.500.376 |
| 205 | Kelompok Substansi Identitas Penduduk | 2.900.130 |
| 206 | Kelompok Substansi Pindah Datang Penduduk | 2.900.130 |
| 207 | Kelompok Substansi Pendataan Penduduk | 2.900.130 |
| 208 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | 5.500.376 |
| 209 | Kelompok Substansi Kelahiran | 2.900.130 |
| 210 | Kelompok Substansi Perkawinan dan Perceraian; | 2.900.130 |
| 211 | Kelompok Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. | 2.900.130 |
| 212 | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 5.500.376 |
| 213 | Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; | 2.900.130 |
| 214 | Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; | 2.900.130 |
| 215 | Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. | 2.900.130 |
| XI | DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 216 | Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 15.100.071 |
| 217 | Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 8.300.615 |
| 218 | kepala subbagian umum dan kepegawaian | 2.900.130 |
| 219 | kepala subbagian program dan keuangan | 2.900.130 |
| 220 | kepala bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak | 5.500.376 |
| 221 | Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan | 2.900.130 |
| 222 | Kelompok Substansi Perlindungan Anak | 2.900.130 |
| 223 | Kepala bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan | 5.500.376 |
| 224 | Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk | 2.900.130 |
| 225 | Kelompok Substansi Advokasi dan Pergerakan | 2.900.130 |
| 226 | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 5.500.376 |
| 227 | Kelompok Substansi Keluarga Berencana; | 2.900.130 |
| 228 | Kelompok Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 2.900.130 |
| | UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P4A) WILAYAH I | |
| 229 | Kepala UPTD P4A | 2.900.130 |

| | | |
|------|--|------------|
| 230 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| | UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P4A) WILAYAH II | |
| 231 | Kepala UPTD P4A | 2.900.130 |
| 232 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| XII | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| 233 | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 15.100.071 |
| 234 | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 8.300.615 |
| 235 | Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian | 2.900.130 |
| 236 | Kelompok Substansi Program dan Keuangan | 2.900.130 |
| 237 | Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan | 5.500.376 |
| 238 | Kelompok Substansi Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan pelestarian Bahan Perpustakaan | 2.900.130 |
| 239 | Kelompok Substansi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan | 2.900.130 |
| 240 | Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca | 5.500.376 |
| 241 | Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan | 2.900.130 |
| 242 | Kelompok Substansi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca | 2.900.130 |
| 243 | Kepala Bidang Kearsipan | 5.500.376 |
| 244 | Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan | 2.900.130 |
| 245 | Kelompok Substansi Pengelolaan Arsip | 2.900.130 |
| XIII | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | |
| 246 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 15.100.071 |
| 247 | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 8.300.615 |
| 248 | Kasubag Program dan Keuangan | 2.900.130 |
| 249 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 2.900.130 |
| 250 | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup | 5.500.376 |
| 251 | Kelompok Substansi Pengelolaan Sampah | 2.900.130 |
| 252 | Kelompok Substansi Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; | 2.900.130 |
| 253 | Kelompok Substansi Pertamanan dan Pemakaman. | 2.900.130 |
| 254 | Kabid Bidang Penataan dan Penaatan PPLH | 5.500.376 |
| 255 | Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan | 2.900.130 |
| 256 | Kelompok Substansi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan | 2.900.130 |
| 257 | Kepala Bidang Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan Hidup | 5.500.376 |
| 258 | Kelompok Substansi Pencemaran Lingkungan | 2.900.130 |
| 259 | Kelompok Substansi Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan | 2.900.130 |
| | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP | |
| 260 | Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | 2.900.130 |
| 261 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |

| | | |
|-----|---|------------|
| | UPTD PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI | |
| 262 | Kepala UPTD Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 2.709.577 |
| | UPTD PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN | |
| 263 | Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan | 2.900.130 |
| 264 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 2.400.056 |
| XIV | DINAS PERTANIAN | |
| 265 | Kepala Dinas Pertanian | 15.100.071 |
| 266 | Sekretaris Dinas Pertanian | 8.300.615 |
| 267 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2.900.130 |
| 268 | Kelompok Substansi Program dan Keuangan | 2.900.130 |
| 269 | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana | 5.500.376 |
| 270 | Kelompok Substansi Sarana | 2.900.130 |
| 271 | Kelompok Substansi Prasarana | 2.900.130 |
| 272 | Kelompok Substansi Pemetaan lahan, Komoditas dan spesifikasi lokal | 2.900.130 |
| 273 | Kepala Bidang Bidang Pengendalian Penanggulangan Bencana dan Perizinan Usaha Pertanian | 5.500.376 |
| 274 | Kelompok Substansi Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian | 2.900.130 |
| 275 | Kelompok Substansi Perizinan Usaha Pertanian | 2.900.130 |
| 276 | Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 5.500.376 |
| 277 | Kelompok Substansi Pembibitan dan Produksi | 2.900.130 |
| 278 | Kelompok Substansi Kesehatan Hewan | 2.900.130 |
| 279 | Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran | 2.900.130 |
| 280 | Kepala Bidang Penyuluhan | 5.500.376 |
| 281 | Kelompok Substansi Kelembagaan | 2.900.130 |
| 282 | Kelompok Substansi Ketenagaan | 2.900.130 |
| XV | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN | |
| 283 | Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan | 15.100.071 |
| 284 | Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan | 8.300.615 |
| 285 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 2.900.130 |
| 286 | Kelompok Substansi Program dan Keuangan | 2.900.130 |
| 287 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap | 5.500.376 |
| 288 | Kelompok Substansi Pemberdayaan Nelayan Kecil | 2.900.130 |
| 289 | Kelompok Substansi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan | 2.900.130 |
| 290 | Kepala Bidang Perikanan Budidaya | 5.500.376 |
| 291 | Kelompok Substansi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan | 2.900.130 |
| 292 | Kelompok Substansi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 2.900.130 |
| 293 | Kepala Bidang Ketahanan Pangan | 5.500.376 |
| 294 | Kelompok Substansi Distribusi dan Ketersediaan Pangan | 2.900.130 |

| | | |
|-------|---|------------|
| 295 | Kelompok Substansi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan | 2.900.130 |
| XVI | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 296 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | 15.100.071 |
| 297 | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja | 8.300.615 |
| 298 | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | 2.900.130 |
| 299 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2.900.130 |
| 300 | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah | 5.500.376 |
| 301 | Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan | 2.900.130 |
| 302 | Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan | 2.900.130 |
| 303 | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 5.500.376 |
| 304 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.900.130 |
| 305 | Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat | 2.900.130 |
| 306 | Kepala Bidang Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 5.500.376 |
| 307 | Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 2.900.130 |
| 308 | Seksi Penanganan dan Penyelamatan. | 2.900.130 |
| XVII | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 309 | Kepala Dinas Perhubungan | 14.800.062 |
| 310 | Sekretaris Dinas Perhubungan | 8.101.203 |
| 311 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2.900.130 |
| 312 | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | 2.900.130 |
| 313 | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan | 5.300.753 |
| 314 | Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan | 2.900.130 |
| 315 | Kepala Seksi Angkutan | 2.900.130 |
| 316 | Kepala Bidang Prasarana | 5.300.753 |
| 317 | Kepala Seksi Prasarana dan Pengembangan | 2.900.130 |
| 318 | Kepala Seksi Perparkiran | 2.900.130 |
| XVIII | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | |
| 319 | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 14.800.062 |
| 320 | Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 8.101.203 |
| 321 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2.900.130 |
| 322 | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | 2.900.130 |
| 323 | Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian | 5.300.753 |
| 324 | Kelompok Substansi Aplikasi Informatika | 2.900.130 |
| 325 | Kelompok Substansi Persandian dan Keamanan Informasi | 2.900.130 |
| 326 | Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik | 5.300.753 |
| 327 | Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi Publik. | 2.900.130 |
| 328 | Kepala Seksi Statistik Sektoral | 2.900.130 |
| XIX | DINAS KETENAGAKERJAAN | |
| 329 | Kepala Dinas Ketenagakerjaan | 14.800.062 |
| 330 | Sekretaris Ketenagakerjaan | 8.101.203 |
| 331 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2.900.130 |
| 332 | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | 2.900.130 |

| | | |
|-----|---|------------|
| 333 | Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Kerja, Transmigrasi dan Pelatihan Produktivitas | 5.300.753 |
| 334 | Kelompok Substansi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi | 2.900.130 |
| 335 | Kelompok Substansi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja | 2.900.130 |
| 336 | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | 5.300.753 |
| 337 | Kelompok Substansi Kelembagaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 2.900.130 |
| 338 | Kelompok Substansi Pengupahan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja | 2.900.130 |
| XX | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | |
| 339 | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | 15.600.454 |
| 340 | Sekretaris Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian | 8.500.822 |
| 341 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 3.000.055 |
| 342 | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | 3.000.055 |
| 343 | Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro | 5.500.376 |
| 344 | Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pengawasan | 3.000.055 |
| 345 | Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro | 3.000.055 |
| 346 | Kepala Bidang Perdagangan | 5.500.376 |
| 347 | Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri | 3.000.055 |
| 348 | Kelompok Substansi Kemetrolagian | 3.000.055 |
| 349 | Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan | 5.500.376 |
| 350 | Kelompok Substansi Sarana dan Pelaku Distribusi | 3.000.055 |
| 351 | Kelompok Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 3.000.055 |
| 352 | Kepala Bidang Perindustrian | 5.500.376 |
| 353 | Kelompok Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri | 3.000.055 |
| 354 | Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri | 3.000.055 |
| XXI | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 355 | Kepala Pelaksana BPBD | 15.100.071 |
| 356 | Sekretaris BPBD | 8.300.615 |
| 357 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2.900.130 |
| 358 | Kelompok Substansi Program dan Keuangan | 2.900.130 |
| 359 | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 5.500.376 |
| 360 | Kelompok Substansi Pencegahan Bencana | 2.900.130 |
| 361 | Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana | 2.900.130 |
| 362 | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik | 5.500.376 |
| 363 | Kelompok Substansi Kedaruratan | 2.900.130 |
| 364 | Kelompok Substansi Logistik | 2.900.130 |
| 365 | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | 5.500.376 |

| | | |
|-------|---|------------|
| 366 | Kelompok Substansi Rehabilitasi | 2.900.130 |
| 367 | Kelompok Substansi Rekonstruksi | 2.900.130 |
| XXII | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| 368 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 18.200.899 |
| 369 | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 10.400.398 |
| 370 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 4.800.553 |
| 371 | Kepala Sub Bagian Program | 4.800.553 |
| 372 | Kelompok Substansi Keuangan | 4.800.553 |
| 373 | Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan | 7.900.149 |
| 374 | Kelompok Substansi Perekonomian | 4.800.553 |
| 375 | Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan | 4.800.553 |
| 376 | Kelompok Substansi Sumber Daya Alam | 4.800.553 |
| 377 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah | 7.900.149 |
| 378 | Kelompok Substansi Penyusunan Perencanaan, Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah | 4.800.553 |
| 379 | Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan | 4.800.553 |
| 380 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 7.900.149 |
| 381 | Kelompok Substansi Pemerintahan | 4.800.553 |
| 382 | Kelompok Substansi Pembangunan Manusia | 4.800.553 |
| 383 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 7.900.149 |
| 384 | Kelompok Substansi Infrastruktur | 4.800.553 |
| 385 | Kelompok Substansi Kewilayahan | 4.800.553 |
| XXIII | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 386 | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah | 19.901.317 |
| 387 | Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah | 10.400.398 |
| 388 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 4.800.553 |
| 389 | Kelompok Substansi Program dan Keuangan | 4.800.553 |
| 390 | Kepala Bidang Anggaran | 7.900.149 |
| 391 | Kepala Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah | 4.800.553 |
| 392 | Kepala Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah. | 4.800.553 |
| 393 | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 7.900.149 |
| 394 | Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja; | 4.800.553 |
| 395 | Kepala Sub Bidang Penyusunan Pelaporan Keuangan. | 4.800.553 |
| 396 | Kepala Bidang Aset | 7.900.149 |
| 397 | Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan pengamanan Aset Daerah | 4.800.553 |
| 398 | Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah | 4.800.553 |
| XXIV | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 399 | Kepala Badan Pendapatan Daerah | 19.901.317 |
| 340 | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah | 10.400.398 |
| 341 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 4.800.553 |

| | | |
|------|--|------------|
| 342 | Kelompok Subtansi Program dan Keuangan | 4.800.553 |
| 343 | Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB | 7.900.149 |
| 344 | Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB | 4.800.553 |
| 345 | Kepala Sub Bidang Penetapan, Penagihan PBB-P2 dan BPHTB | 4.800.553 |
| 346 | Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya | 7.900.149 |
| 347 | Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya | 4.800.553 |
| 348 | Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya | 4.800.553 |
| 349 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah | 7.900.149 |
| 350 | Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keberatan | 4.800.553 |
| 351 | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi | 4.800.553 |
| XXIV | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 352 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 17.000.864 |
| 353 | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 9.900.676 |
| 354 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 4.700.628 |
| 355 | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | 4.700.628 |
| 356 | Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karier dan Penilaian Kerja Aparatur | 6.900.192 |
| 357 | Kelompok Substansi Mutasi | 4.700.628 |
| 358 | Kelompok Substansi Pengembangan Karir | 4.700.628 |
| 359 | Kelompok Substansi Disiplin dan Penilaian Kinerja | 4.700.628 |
| 360 | Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi | 6.900.192 |
| 361 | Kelompok Substansi Pengadaan dan Pemberhentian; | 4.700.628 |
| 362 | Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi Aparatur | 4.700.628 |
| 363 | Kelompok Substansi Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN | 4.700.628 |
| XXV | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 364 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15.100.071 |
| 365 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 8.300.615 |
| 366 | Kelompok Substansi Program dan Keuangan | 2.900.130 |
| 367 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2.900.130 |
| 368 | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama | 5.500.376 |
| 369 | Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 2.900.130 |
| 370 | Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama | 2.900.130 |
| 371 | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | 5.500.376 |
| 372 | Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri | 2.900.130 |

| | | |
|--------|---|-----------|
| 373 | Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan | 2.900.130 |
| 374 | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | 5.500.376 |
| 375 | Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen | 2.900.130 |
| 376 | Kelompok Substansi Penanganan Konflik | 2.900.130 |
| XXVI | KECAMATAN CIGUGUR | |
| 377 | Camat Cigugur | 9.100.646 |
| 378 | Sekretaris Camat | 5.300.753 |
| 379 | Kepala Sub Bagian Umum | 2.400.056 |
| 380 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 2.700.282 |
| 381 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.800.501 |
| 382 | Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 2.800.501 |
| 383 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.800.501 |
| XXVII | KECAMATAN CIJULANG | |
| 384 | Camat Cijulang | 9.100.646 |
| 385 | Sekretaris Camat | 5.300.753 |
| 386 | Kepala Sub Bagian Umum | 2.400.056 |
| 387 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 2.700.282 |
| 388 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.800.501 |
| 389 | Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 2.800.501 |
| 390 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.800.501 |
| XXVIII | KECAMATAN CIMERAK | |
| 391 | Camat Cimerak | 9.100.646 |
| 392 | Sekretaris Camat | 5.300.753 |
| 393 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 2.700.282 |
| 394 | Kepala Sub Bagian Umum | 2.400.056 |
| 395 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.800.501 |
| 396 | Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 2.800.501 |
| 397 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.800.501 |
| XXIX | KECAMATAN KALIPUCANG | |
| 398 | Camat Kalipucang | 9.100.646 |
| 399 | Sekretaris Camat | 5.300.753 |
| 400 | Kepala Sub Bagian Umum | 2.400.056 |
| 401 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 2.700.282 |
| 402 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.800.501 |
| 403 | Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 2.800.501 |
| 404 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.800.501 |
| XXX | KECAMATAN MANGUNJAYA | |
| 405 | Camat Mangunjaya | 9.100.646 |
| 406 | Sekretaris Camat | 5.100.516 |
| 407 | Kepala Sub Bagian Umum | 2.400.056 |
| 408 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 2.700.282 |
| 409 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.800.501 |

| | | |
|--------|--|-----------|
| 410 | Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 2.800.501 |
| 411 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.800.501 |
| XXXI | KECAMATAN PADAHERANG | |
| 412 | Camat Padaherang | 9.100.646 |
| 413 | Sekretaris Camat | 5.300.753 |
| 414 | Kepala Sub Bagian Umum | 2.400.056 |
| 415 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 2.700.282 |
| 416 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.800.501 |
| 417 | Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 2.800.501 |
| 418 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.800.501 |
| XXXII | KECAMATAN PANGANDARAN | |
| 419 | Camat Pangandaran | 9.100.646 |
| 420 | Sekretaris Camat | 5.300.753 |
| 421 | Kepala Sub Bagian Umum | 2.400.056 |
| 422 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 2.700.282 |
| 423 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.800.501 |
| 424 | Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 2.800.501 |
| 425 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.800.501 |
| XXXIII | KECAMATAN PARIGI | |
| 426 | Camat Parigi | 9.100.646 |
| 427 | Sekretaris Camat | 5.300.753 |
| 428 | Kepala Sub Bagian Umum | 2.400.056 |
| 429 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 2.700.282 |
| 430 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.800.501 |
| 431 | Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 2.800.501 |
| 432 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.800.501 |
| XXXIV | KECAMATAN SIDAMULIH | |
| 433 | Camat Sidamulih | 9.100.646 |
| 434 | Sekretaris Camat | 5.300.753 |
| 435 | Kepala Sub Bagian Umum | 2.400.056 |
| 436 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 2.700.282 |
| 437 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.800.501 |
| 438 | Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 2.800.501 |
| 439 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.800.501 |
| XXXV | KECAMATAN LANGKAPLANCAR | |
| 440 | Camat Langkaplancar | 9.100.646 |
| 441 | Sekretaris Camat | 5.300.753 |
| 442 | Kepala Sub Bagian Umum | 2.400.056 |
| 443 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 2.700.282 |
| 444 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.800.501 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| | | |
| 445 | Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan | 2.800.501 |
| 446 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.800.501 |

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



H. Jeje Wiradinata, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 91 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 Desember 2022

B. PERTIMBANGAN LAINNYA

| No | Jabatan | Besaran (Rp) |
|----|--|--------------|
| 1 | Asisten | 1.500.000 |
| 2 | Staf Ahli | 2.000.000 |
| 3 | Sopir Sekda | 1.530.000 |
| 4 | Sopir KDH/WKDH | 2.530.000 |
| 5 | Ajudan Sekda | 2.240.000 |
| 6 | Ajudan KDH/WKDH | 2.740.000 |
| 7 | Pengawas Kepariwisata (TIMSUS) | 1.090.000 |
| 8 | Sekpri KDH/WKDH | 1.040.000 |
| 9 | Penyusun Naskah Pidato | 1.000.000 |
| 10 | Penjabat Kepala Desa | 3.000.000 |
| 11 | PPPK | 300.000 |
| 12 | Pelaksana yang menjadi PPTK | 1.500.000 |
| 13 | PPTK yang bertugas memfasilitasi Rumah Tangga KDH/WKDH | 2.750.000 |

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Shadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010